

## PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA

### PENGADILAN NEGERI NEGARA



### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rr.Diah Poernomojkti, SH.

Jabatan : Wakil Ketua Pengadilan Negeri Negara.

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**,

Nama : I Ketut Gede,SH.,MH..

Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Bali


selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**,

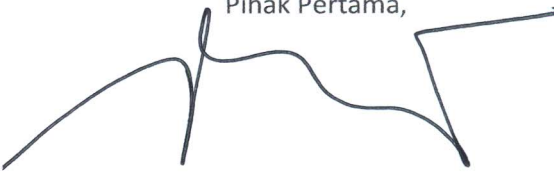
Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Negara, 2 Januari 2018

Pihak Kedua  
  
I Ketut Gede,SH.,MH.

Pihak Pertama,  
  
Rr.Diah Poernomojkti, SH.

## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

UNIT KERJA : Pengadilan Negeri Negara

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
	<b>I. TUGAS POKOK</b>		
1.	Mendisposisi surat penyitaan dan pengeledahan	Terciptanya dasar hukum bagi penyitaan dan pengeledahan	100%
2	Menerima dan mempelajari berkas perkara pidana cepat	Pelaksanaan tugas pejabat peradilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang	100%
3	Menetapkan berkas perkara pidana cepat	Pelaksanaan tugas pejabat peradilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang	100%
4	Menerima dan mempelajari berkas perkara pelanggaran lalu lintas	Pelaksanaan tugas pejabat peradilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang	100%
5	Menetapkan berkas perkara lalu lintas	Pelaksanaan tugas pejabat peradilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang	100%
6	Menerima dan mempelajari berkas perkara perdata permohonan	Pelaksanaan tugas pejabat peradilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang	100%
7	Menetapkan berkas perkara permohonan	Pelaksanaan tugas pejabat peradilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang	100%
8	Melaksanakan persidangan perkara pidana dan perdata	Pelaksanaan tugas pejabat peradilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang	100%
9	Musyawarah Majelis untuk putusan	Pelaksanaan tugas pejabat peradilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang	95%
10	Memeriksa laporan pengawasan bidang	Terciptanya tertib administrasi dan kedisiplinan	100%
11	Melakukan pengawasan absensi	Terciptanya kedisiplinan kerja pegawai	100%
12	Melaksanakan tugas sebagai ketua Baperjakat	Terciptanya aparatur peradilan yang berkualitas	60%
	<b>II. TUGAS TAMBAHAN</b>		
1	Menerima dan mempelajari berkas gugatan perdata	Pelaksanaan tugas pejabat peradilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang	100%
2	Menetapkan berkas perkara gugatan perdata	Pelaksanaan tugas pejabat peradilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang	100%
3	Menerima dan mempelajari berkas perkara pidana biasa	Pelaksanaan tugas pejabat peradilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang	100%
4	Menetapkan berkas perkara pidana biasa	Pelaksanaan tugas pejabat peradilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang	100%
5	Menerima dan mempelajari berkas perkara pidana anak	Pelaksanaan tugas pejabat peradilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang	100%
6	Menetapkan berkas perkara pidana anak	Pelaksanaan tugas pejabat peradilan sebagaimana diatur	100%

